



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

doi.org/10.63822/sz9h9535

Hal. 251-261

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Pancasila dan Islam: Sintesis Teologi politik dalam Konteks Keindonesiaan

**Rizky Halimatus Sya'diah¹, Reihan Irsyad Maulana², Dadan Firdaus³,
Farhan Maulana Trisnadi⁴, Alya Rahmawati⁵, Silvia Syifa Nur Padilah⁶**
UIN Sunan Gunung Djati^{1,2,3,4,5,6}

*Email:

rizkyahalimatussyadiyah@gmail.com¹, reihanrkg212@gmail.com², dadanfirdaus@uinsgd.ac.id³,
farhanmaulanatrisnadi@gmail.com⁴, rhmalyaww02@gmail.com⁵, nurpad94@gmail.com⁶

Diterima: 01-07-2025 | Disetujui: 06-07-2025 | Diterbitkan: 09-07-2025

ABSTRACT

This article examines the synthesis between Pancasila and Islam in the context of political theology in Indonesia. The focus of the study lies in the understanding that the relationship between Islam and the state does not necessarily require a formal Islamic state, but rather a substantialist approach that emphasizes justice, humanity, and public morality in accordance with Islamic teachings. This research employs a qualitative method through a literature study of historical sources, academic works, and thoughts of contemporary Indonesian Muslim figures. The findings reveal that Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah play a significant role in strengthening Pancasila values through a moderate and inclusive Islamic approach. Furthermore, the concept of Islam Nusantara emerges as an alternative model of political theology that emphasizes local wisdom, nationalism, and pluralism. The synthesis between Islam and Pancasila through substantialist political theology has proven effective in countering radicalism and supporting political development based on spiritual and national values. The study concludes that strengthening the discourse on substantialist political theology in public spaces and educational institutions is essential to preserve national unity and address contemporary challenges.

Keywords: Political Theology, Islam, Pancasila, Substantialism, Islam Nusantara

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji sintesis antara Pancasila dan Islam dalam konteks teologi politik di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak harus diwujudkan melalui bentuk negara Islam secara formalistik, tetapi melalui pendekatan substansialistik yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keadaban publik yang sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber historis, karya akademik, dan pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan Islam moderat dan inklusif. Selain itu, konsep Islam Nusantara muncul sebagai model teologi politik alternatif yang menekankan pentingnya lokalitas, kebangsaan, dan pluralisme. Sintesis antara Islam dan Pancasila dalam bentuk teologi politik substansialistik terbukti mampu merespons tantangan radikalisme dan mendukung pembangunan politik yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan diskursus teologi



politik substansialistik di ruang publik dan institusi pendidikan sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan menjawab tantangan zaman.

Kata kunci: Teologi Politik, Islam, Pancasila, Substansialisme, Islam Nusantara

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rizky Halimatus Sya'diah, Reihan Irsyad Maulana, Dadan Firdaus, Farhan Maulana Trisnadi, Alya Rahmawati, & Silvia Syifa Nur Padilah. (2025). Pancasila dan Islam: Sintesis Teologi politik dalam Konteks Keindonesiaan. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(3), 251-261. <https://doi.org/10.63822/sz9h9535>



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki sejarah panjang interaksi antara agama dan negara. Sejak awal kemerdekaan, perdebatan mengenai posisi Islam dalam konstitusi negara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik kebangsaan. Ketegangan antara kelompok nasionalis-sekuler dan kelompok Islamis mendorong munculnya kompromi ideologis dalam bentuk Pancasila, yang hingga kini menjadi dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa. Namun demikian, relasi antara Pancasila dan Islam tetap menjadi isu yang kompleks dan terus berkembang dalam wacana politik dan keagamaan di Indonesia.

Dalam konteks global, munculnya kembali gerakan Islam politik dengan kecenderungan konservatif dan transnasional telah memunculkan tantangan baru bagi integrasi Islam dalam kerangka kebangsaan Indonesia. Di tengah tantangan ini, muncul pendekatan teologi politik substansialistik, yang tidak berfokus pada bentuk negara Islam secara formal, melainkan pada esensi nilai-nilai Islam yang mendukung keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Model ini diyakini lebih sesuai dengan karakter multikultural dan pluralistik bangsa Indonesia.

Beberapa studi telah membahas relasi antara Islam dan negara di Indonesia. Misalnya, karya Luthfi Assyaukanie yang mengklasifikasikan pemikiran politik Islam di Indonesia menjadi tiga model: Islamisme, modernisme, dan sekularisme.¹ Sementara itu, Budhy Munawar-Rachman memperkenalkan gagasan Islam progresif yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan HAM.² Penelitian lain oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy menyoroti peran ormas Islam dalam transisi demokrasi di Indonesia.³ Namun, kajian yang secara spesifik membahas sintesis antara Pancasila dan Islam dalam perspektif teologi politik substansialistik masih relatif terbatas, terutama yang menekankan peran Islam Nusantara sebagai model teologi politik khas Indonesia.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sintesis antara Pancasila dan Islam dapat dibangun melalui pendekatan teologi politik substansialistik, serta bagaimana kontribusi aktor-aktor Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam membumikan sintesis tersebut. Penelitian ini juga ingin mengkaji bagaimana Islam Nusantara sebagai model teologi politik alternatif mampu menjawab tantangan radikalisme dan mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks Indonesia kontemporer.

PEMBAHASAN

Islam dan Politik

Pemisahan dan Keterkaitan Agama-Politik di Indonesia.

Hubungan antara agama dan politik di Indonesia memiliki karakteristik unik: tidak sepenuhnya sekuler seperti di Barat, namun juga tidak menjadikan agama sebagai fondasi negara. Model ini dikenal sebagai sekularisme kontekstual, yang memisahkan institusi agama dan negara sambil tetap memberikan ruang bagi ekspresi keagamaan di ranah publik.

Fossati (2019) mengamati bahwa mayoritas Muslim Indonesia tidak mendukung pembentukan negara Islam, tetapi mereka menginginkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kejujuran menjadi landasan kebijakan publik. Ia menyebut fenomena ini sebagai "kebangkitan ideologi," yang mencerminkan signifikansi etika keagamaan tanpa mengarah pada radikalisme. Senada, Meran (2019) memandang



sekularisme Indonesia sebagai bentuk yang terbuka dan inklusif, di mana agama dapat hadir di ruang publik asalkan tidak mendominasi negara. Sementara itu, Saifuddin (2018) menyoroti bagaimana sejak kemerdekaan, pendekatan negara terhadap agama berevolusi dari kontrol yang bersifat top-down menjadi model yang lebih akomodatif terhadap ekspresi keagamaan, termasuk dalam pendidikan dan regulasi yang berbasis nilai-nilai Islam.

Irfani (2022) menekankan peran penting Pancasila sebagai titik temu antara nilai-nilai religius dan kebangsaan. Islam, meskipun tidak diresmikan sebagai hukum negara, tetap menjadi sumber inspirasi moral dalam politik. Bahkan di era Reformasi, ekspresi politik Islam berkembang dalam kerangka demokrasi konstitusional, dengan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah memelopori pendekatan substansial yang mengutamakan nilai-nilai etis tanpa perlu formalisasi syariat.

Substansialisme: Etika Islam dalam Demokrasi Indonesia

Substansialisme dalam politik Islam di Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai etis Islam—seperti keadilan, akhlak, dan musyawarah—tanpa menjadikan negara Islam sebagai tujuan politik. Prinsip ini beranggapan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan kompatibel dengan demokrasi Pancasila.

Nurcholish Madjid (2003) adalah pelopor gagasan ini melalui slogannya "Islam Yes, Partai Islam No," yang menolak formalisasi agama dalam institusi negara tetapi tetap menekankan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan politik. Hamdan Zoelva (2022) juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan partisipasi publik justru dapat diterapkan secara optimal dalam sistem demokrasi yang terbuka.

Al-Ashriyyah (2018) menambahkan bahwa pendekatan substansial mencegah eksklusivisme agama dan lebih sesuai untuk masyarakat plural seperti Indonesia. Sejalan dengan itu, Rizky (2022) menjelaskan bahwa konsep syura (musyawarah) dalam Islam selaras dengan prinsip deliberatif dalam demokrasi modern, menjadikannya relevan dalam pengambilan kebijakan publik.

Praktik keagamaan NU dan Muhammadiyah mencerminkan pendekatan substansialis ini, di mana mereka lebih fokus pada pendidikan, advokasi sosial, dan kesejahteraan masyarakat daripada memperjuangkan formalisasi negara Islam. Hal ini juga ditegaskan oleh temuan Suffah Journal (2025), yang menyebut kontribusi ormas Islam sebagai wujud nyata integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem demokrasi konstitusional.

Peran Ormas Islam dalam Demokrasi dan Keadilan Sosial

Organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memainkan peran krusial dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial di Indonesia. Mereka tidak berorientasi pada pembentukan negara Islam, melainkan pada penerapan nilai-nilai Islam yang bersifat substansial dalam kebijakan publik.

Menurut Miski (2023), kedua ormas ini berkontribusi dalam membentuk masyarakat sipil yang inklusif dan moderat melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan dialog antaragama. Ivoni Suci (2022) juga menyatakan bahwa keterlibatan ormas-ormas ini memperkuat demokrasi substantif, terutama melalui mekanisme partisipasi politik yang sah. Dalam upaya deradikalisasi, Rusli dan Sugiarto (2022) menekankan peran penting mereka dalam mencegah ekstremisme melalui pendidikan Islam yang moderat.



Lebih lanjut, Pratama (2024) menjelaskan bahwa ormas Islam bertindak sebagai kekuatan penyeimbang dalam demokrasi dengan mengawasi kebijakan pemerintah secara kritis namun konstitusional. Bahkan lembaga seperti MUI, menurut Rofii (2010), turut memperkuat nilai demokrasi melalui fatwa dan nasihat etis dalam ranah politik.

Secara keseluruhan, ormas Islam di Indonesia menjalankan fungsi substansial dengan mengarusutamakan nilai-nilai etika Islam dalam proses demokrasi, bukan melalui formalisasi negara Islam.

Islam Nusantara Sebagai Model Teologi Politik Alternatif

Asal-usul konsep “Islam Nusantara”

Konsep Islam Nusantara pertama kali dipopulerkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-33 yang diselenggarakan di Jombang pada 1–5 Agustus 2015. Gagasan ini muncul sebagai tanggapan terhadap munculnya arus Islam transnasional yang lebih konservatif dan tidak sesuai dengan konteks lokal Indonesia. Menurut prinsip Islam Nusantara, orang Islam yang datang ke Nusantara mengalami proses akulturasi damai dengan budaya lokal sejak era Walisongo, sehingga menghasilkan corak keberislaman yang santun, moderat, dan kontekstual. Sebagai bentuk pribumisasi Islam, Islam Nusantara berusaha memberikan nilai-nilai Islam yang dapat berinteraksi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan makna ajarannya. Dalam konteks ini, Maulana (2018) menyatakan bahwa Islam Nusantara bukanlah sinkretisme. Sebaliknya, nilai-nilai Islam diadaptasi secara proporsional ke dalam budaya lokal, terutama dalam hal muamalah.

Nilai-nilai lokalitas, kebangsaan, dan pluralisme

Dalam Islam Nusantara, nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan lokal, seperti tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil), menjadi dasar sikap beragama masyarakat Muslim Indonesia. Nilai-nilai ini menciptakan corak keberislaman yang moderat (wasathiyah), toleran, dan seimbang. Mereka juga membawa semangat rahmatan lil'alamin dan inklusifisme. Praktik keagamaan seperti tahlilan, maulidan, dan slametan mencerminkan nilai-nilai lokal, yang berbasis Islam meskipun bersifat kultural. Islam Nusantara tidak bertentangan dengan Pancasila dalam konteks kebangsaan. Sebaliknya, melalui pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan damai, ia membantu memperkuat identitas keagamaan dan nasional dalam kerangka keutuhan NKRI (Mubarok & Rahman, 2023).

Islam Nusantara sebagai ekspresi teologi politik khas Indonesia

Sebagai ekspresi teologi politik, Islam Nusantara menawarkan model keberagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berakar dari pengalaman sejarah bangsa. Nilai budaya merupakan bagian penting dari keberislaman Islam Nusantara, berbeda dengan aliran Islam politik yang sering dikaitkan dengan strategi kekuasaan. Dalam aspek ini, Islam Nusantara berusaha untuk membangun fiqh sosial-politik yang kontekstual, bukan sekadar normatif-formal. Ini menentang gagasan negara Islam transnasional dan mendukung negara bangsa yang inklusif yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan publik. Tokoh-tokoh pesantren seperti KH Sahal Mahfudh berperan penting dalam membangun fiqh sosial sebagai landasan praktik teologi politik Islam di Nusantara. Dari perspektif historis-politik pesantren dan santri, Islam Nusantara memungkinkan interaksi yang fleksibel antara agama dan



negara tanpa memaksakan ideologi keagamaan yang homogen. Ini juga ditunjukkan oleh pemikiran Gus Dur.

Tanggapan terhadap kritik

Islam Nusantara kerap dikritik sebagai bentuk sinkretisme karena mencampuradukkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Namun, ini merupakan bentuk pribumisasi Islam yang berarti ajaran Islam disesuaikan dengan lingkungan lokal tanpa mengubah maknanya. Astuti (2018) menegaskan bahwa Islam Nusantara menyampaikan Islam secara membumi dan kontekstual dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya. Alma'arif (2015) menyatakan bahwa selama nilai-nilai tauhid dan rasionalitas Islam tidak dihilangkan dari budaya, mereka dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Oleh karena itu, Islam Nusantara bukan bentuk penyimpangan, melainkan strategi teologi politik yang kontekstual, inklusif, dan sah dalam konteks keislaman.

Peran NU

Sejak era pasca-reformasi, NU dan Muhammadiyah telah menampilkan diri sebagai dua aktor utama dalam demokratisasi Indonesia, membawa warisan historisnya ke ranah sosial-politik yang inklusif. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang lahir tahun 1912 dengan platform reformis dan ijtihad, selama ini menonjol sebagai penjaga moderasi Islam melalui sektor pendidikan dan layanan sosial, serta menjauh dari politik praktis formal.

Sementara itu, NU—yang memiliki akar tradisional kuat—mengalami perubahan signifikan dari awalnya berafiliasi partai menjadi ormas sosial-keagamaan yang menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila dan demokrasi. Transformasi ini telah dipelajari secara mendalam oleh Maksun & Leoninda (2024), yang mencatat NU bergeser dari tafsir konservatif menjadi agen inklusif dalam lanskap politik nasional. Dalam penguatan demokrasi dan pemerintahan yang stabil, Muhammadiyah terbukti memainkan peran penting, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Prasetyo & Etwina (2024): melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan yang baik, dan penguatan masyarakat sipil, Muhammadiyah menjaga keseimbangan antara kritik kritis dan kolaborasi dengan pemerintah.

NU juga secara aktif memperkokoh demokrasi lewat posisi moralnya. Seperti dicatat studi INFID, NU sejak awal kemerdekaan menolak politisasi agama ekstrem dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi final—sejak Munas Situbondo 1983 hingga Muktamar Modern 2019

Isu radikalisme dan intoleransi kini menjadi medan utama kedua organisasi ini. Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai garda depan moderasi, mempromosikan washatiyah dalam Islam yang menolak liberalisme ekstrem dan fundamentalis, serta melalui amal usaha seperti pendidikan dan layanan sosial menggalang deradikalisasi preventif. Sedangkan NU secara konsisten mendakwahkan Islam Nusantara—yang bertumpu pada prinsip tasamuh, tawasuth, tawazun, adl, dan ukhuwah—menolak ekstremisme melalui dialog global dan kaderisasi intensif.

Dalam partisipasi politik, NU dan Muhammadiyah memilih jalur etis dan etis tanpa menjadi partai politik. Muhammadiyah menjaga netralitas institusional, meski kadernya secara individual bisa terlibat dalam partai seperti PAN ([nu.or.id][1]). NU pun memfokuskan diri pada posisi moral dan naratif, menghindari politisasi agama dan menjadikan Pancasila sebagai landasan atas segala bentuk advokasi sosial-politik.



Tantangan Kontemporer dan Prospek Teologi Politik Keindonesiaan

Ancaman Radikalisme dan Islam Politik Formalis

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dari munculnya gerakan Islam politik berhaluan formalis dan radikal. Gerakan ini kerap menolak legitimasi negara bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara, sembari menawarkan sistem khilafah sebagai alternatif ideal. Formulasi politik Islam semacam ini lebih menekankan pada simbol-simbol formal ketimbang nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Radikalisme ini tidak hanya hadir dalam bentuk fisik (aksi kekerasan), tetapi juga dalam bentuk ideologis dan naratif yang menyusup ke ruang-ruang pendidikan, organisasi dakwah, hingga institusi digital.¹

Menurut Satibi, radikalisme keagamaan di Indonesia memiliki akar teologis yang kuat, bersumber dari tafsir literal terhadap ayat-ayat jihad, konsep al-walā' wa al-barā', serta pengaruh pemikiran ideolog Islam transnasional seperti Sayyid Qutb dan Taqiuddin al-Nabhani.² Hal ini mendorong sebagian umat Islam, terutama kalangan muda, untuk mendukung agenda politik keislaman yang konfrontatif terhadap demokrasi dan pluralisme. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi narasi keislaman moderat dan kebangsaan.

Peran Media Sosial dan Generasi Muda

Di era digital, media sosial menjadi ruang baru pertarungan ideologi. Kelompok-kelompok radikal secara aktif memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, Telegram, dan TikTok untuk menyebarkan propaganda, merekrut simpatisan, dan membangun narasi identitas keagamaan yang eksklusif. Muthohirin mencatat bahwa strategi digital kelompok radikal dirancang secara terencana, dengan konten visual yang menarik dan pesan-pesan emosional yang menysar kaum muda.³

Penelitian Fajri bahkan menunjukkan bahwa pasca pembubaran HTI, sisa-sisa pengaruh ideologinya masih sangat terasa di media sosial, khususnya Instagram. Generasi muda yang akrab dengan teknologi informasi seringkali menjadi sasaran utama, terlebih bila mereka tidak dibekali pemahaman keislaman yang kritis dan kontekstual. Oleh karena itu, peran pendidikan dan literasi digital menjadi sangat penting dalam membendung penyebaran paham keagamaan yang intoleran dan anti-Pancasila.

Masa Depan Wacana Teologi Politik Substansialistik

Meskipun tantangan cukup besar, prospek teologi politik substansialistik tetap terbuka lebar. Tradisi intelektual Islam Indonesia, terutama yang berkembang di pesantren dan ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, telah lama mendorong bentuk keberagamaan yang etis, kontekstual, dan inklusif. Pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional, menurut Zamakhsyari Dhofier, telah lama menjadi pusat pemeliharaan Islam yang berkarakter damai dan nasionalis.

Azyumardi Azra menegaskan bahwa Islam Nusantara yang berkembang di Indonesia memiliki karakteristik teologi politik moderat—terbuka terhadap demokrasi, pluralitas, dan nilai-nilai lokal—yang menjadikannya model teologi politik yang khas dan kompatibel dengan semangat Pancasila.⁶

Ke depan, keberlanjutan wacana ini sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor sosial—kyai, akademisi, pendidik, dan generasi muda—untuk mengaktualisasikan nilai-nilai substansial Islam melalui berbagai kanal, termasuk dunia digital. Dengan narasi yang inklusif dan pembaruan pemikiran Islam yang



responsif terhadap zaman, teologi politik substansialistik berpotensi menjadi paradigma dominan dalam lanskap keislaman Indonesia modern.

KESIMPULAN

Sintesis antara Pancasila dan Islam dalam konteks politik Indonesia mencerminkan sebuah bentuk teologi politik yang khas dan unik, yang mengedepankan nilai-nilai etis dan substansial daripada formalisasi simbol-simbol keagamaan dalam negara. Pendekatan substansialistik ini tidak hanya memungkinkan integrasi antara spiritualitas Islam dan semangat kebangsaan, tetapi juga menjadi dasar penguatan demokrasi, keadilan sosial, dan pluralisme dalam kehidupan berbangsa.

Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sangat signifikan dalam membentuk wajah teologi politik Indonesia yang moderat dan inklusif. Melalui kontribusinya dalam pendidikan politik, peneguhan Pancasila, dan penolakan terhadap radikalisme, kedua ormas ini menjadi pilar penting dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan negara.

Konsep Islam Nusantara turut melengkapi wacana teologi politik Indonesia dengan menekankan pentingnya kearifan lokal, toleransi, dan cinta tanah air. Meskipun menghadapi berbagai kritik, Islam Nusantara tetap relevan sebagai alternatif teologis yang mampu menjawab tantangan keberagaman Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashriyyah. (2018). Substansialisme dalam politik Islam Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah*. [\[https://ejournal.alashriyyah.ac.id/index.php/aqidah/article/view/31\]](https://ejournal.alashriyyah.ac.id/index.php/aqidah/article/view/31)(<https://ejournal.alashriyyah.ac.id/index.php/aqidah/article/view/31>)
- Alma'arif, A. (2015). Islam Nusantara: Studi epistemologis dan kritis. *Analisis*, 15(2), 375–400. [\[https://share.google/kGAYmlCqx1W6RXxK4\]](https://share.google/kGAYmlCqx1W6RXxK4)(<https://share.google/kGAYmlCqx1W6RXxK4>)
- Ali, F., & Effendy, B. (1992). *Merambah jalan baru Islam: Rekonstruksi pemikiran Islam Indonesia masa Orde Baru*. Mizan. [\[https://books.google.co.id/books?id=qUtJnwEACAAJ\]](https://books.google.co.id/books?id=qUtJnwEACAAJ)(<https://books.google.co.id/books?id=qUtJnwEACAAJ>)
- Aravik, H., & Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah. (2016). Islam dan pluralisme agama (Islam and religious pluralism). *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 4. [\[https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/184/100\]](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/184/100)(<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/184/100>)
- Astuti, S. (2018). Islam Nusantara: Sebuah argumentasi beragama dalam konteks multikulturalisme Indonesia. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 3(1), 27–52. [\[https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/1320\]](https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/1320)(<https://inject.iainsalatiga.ac.id/index.php/INJECT/article/view/1320>)
- Azra, A. (2019). Islam Nusantara: A middle way?ResearchGate. [\[https://www.researchgate.net/publication/312252628_Islam_Nusantara_A_Middle_Way\]](https://www.researchgate.net/publication/312252628_Islam_Nusantara_A_Middle_Way)(https://www.researchgate.net/publication/312252628_Islam_Nusantara_A_Middle_Way)



- Bruinessen, M. V. (2013). *Gus Dur dan pergulatan pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: LKiS.
- Dhofier, Z. (1980). *The pesantren tradition: The role of the kyai in the maintenance of traditional Islam in Java* (PhD thesis). Australian National University. <https://archive.org/details/zamakhshyari-dhofier-the-pesantren-tradision-1980-anu-ph-d-thesis> (<https://archive.org/details/zamakhshyari-dhofier-the-pesantren-tradision-1980-anu-ph-d-thesis>)
- Fajri, Y. (2024). Radikalisme Islam dan deradikalisasi di media sosial Instagram. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 89–105. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15236> (<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15236>)
- Fossati, D. (2019). The resurgence of ideological politics in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–140. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103419868400> (<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1868103419868400>)
- Ichwan, M. N. (2016). Towards a puritanical moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the politics of religious orthodoxy. In M. Feener & N. Alam (Eds.), *Islam and the state in Indonesia* (pp. 58–80). Singapore: ISEAS Publishing.
- Irfani, K. (2022). Islam dan Pancasila dalam realitas politik nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–60. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/edureligia/article/view/949> (<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/edureligia/article/view/949>)
- Ivoni Suci, A. (2022). Peran organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembangunan demokrasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 15–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jpp/article/view/5013> (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jpp/article/view/5013>)
- Latif, Y. (2018). Wacana keislaman dan keindonesiaan NU dan Muhammadiyah dalam penguatan negara Pancasila. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 109–122. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/38089> (<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/38089>)
- Luthfi Assyaukanie. (2009). *Islam and the secular state in Indonesia*. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://books.google.co.id/books?id=H8ZEwdcxQX0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> (<https://books.google.co.id/books?id=H8ZEwdcxQX0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>)
- Madjid, N. (2003). *Islam yes, partai Islam no: Gagasan pembaruan Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Maulana, M. P. (2018). Relasi Islam dan budaya dalam wacana Islam Nusantara. *Yaqzhan: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 4(1). <https://www.syekhknurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/3191> (<https://www.syekhknurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/article/view/3191>)
- Maxum, M. N. R., & Leoninda, M. W. (2024). Partisipasi NU terhadap agenda politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 31485–31488. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18138> (<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18138>)



- Meran, M. (2019). Inclusive secularism in Indonesia: The balance between Islam and the state. ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/335239141>(<https://www.researchgate.net/publication/335239141>)
- Miski, M. (2023). Membangun image Indonesia dan peran masyarakat sipil: Studi terhadap NU dan Muhammadiyah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 27(1), 73–88.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/71789>(<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/71789>)
- Mubarak, M. F. Z., & Rahman, M. T. (2023). Membandingkan konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam kerangka pluralisme. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1(4), 186–199.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11813>(<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/11813>)
- Muthohirin. (2015). Radikalisme Islam dan pergerakannya di media sosial. Jurnal Keamanan Nasional, 1(2), 115–130. <https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/riset-3/perang-wacana-di-media-sosial>(<https://lp2m.iainpare.ac.id/blog/riset-3/perang-wacana-di-media-sosial>)
- Prasetyo, S. A., & Etwina, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 2(4), 175–185. <https://doi.org/10.62083/zhy67s73>(<https://doi.org/10.62083/zhy67s73>)
- Pratama, R. (2024). Check and balances oleh ormas Islam dalam demokrasi Indonesia. Jurnal Demokrasi, 19(1), 40–55.
- Qodir, Z. (2019). Muhammadiyah memperkuat moderasi Islam memutus radikalisme. Maarif: Journal of Islamic Studies, 14(1), 1–14.
<https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.62>(<https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.62>)
- Rizky, H. (2022). Syura dan demokrasi: Tinjauan prinsip-prinsip deliberatif dalam Islam. Jurnal Ilmu Politik Islam, 4(2), 101–115.
- Rofii, M. S. (2010). Peran MUI dalam penguatan demokrasi Indonesia. Jurnal Sosial Politik UIN Jakarta, 8(2), 89–104.
- Rusli, R., & Sugiarto, A. (2022). Moderasi Islam dan deradikalisasi dalam pendidikan Islam. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 55–70.
<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/692>(<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/692>)
- Saifuddin. (2018). Relasi agama dan negara di Indonesia. STJSPS, 6(1), 23–38.
- Satibi. (2023). Akar teologi-politik gerakan radikalisme Islam dan terorisme di Indonesia. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(2), 77–91.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/7373>(<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/7373>)
- Suffah Journal. (2025). Peran ormas Islam dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Jurnal Suffah, 9(1), 12–28.
- Suryanegara, A. H. (2017). Api sejarah 2: Mahakarya peradaban Islam yang menginspirasi dunia. Bandung: Pustaka Al-Kautsar.



- Wahid, A. (2017). NU dan politik: Strategi dakwah kultural di tengah arus demokrasi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 381–404.
[\[https://doi.org/10.21154/tahrir.v17i2.1013\]](https://doi.org/10.21154/tahrir.v17i2.1013)(<https://doi.org/10.21154/tahrir.v17i2.1013>)
- Yumnah, S. (2022). Eksistensi pendidikan Islam NU dan Muhammadiyah sebagai potret Islam moderat di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (ACoMS)*, 2(1), 297–304.
[\[https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/ACoMS/article/view/6911\]](https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/ACoMS/article/view/6911)(<https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/ACoMS/article/view/6911>)